

ANALISIS PENERIMAAN PENGELOLAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI JAMBI

Pebrian Togatorop¹

Program Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

pebriantogatoropjr@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi pada periode 2019-2023. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen penting dalam struktur PAD yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan persentase kontribusi selama lima tahun terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PKB di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2022, meskipun mengalami sedikit penurunan 2023. Penerimaan PKB meningkat dari Rp457,83 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp612,41 miliar pada tahun 2022, sebelum turun menjadi Rp604,47 miliar pada tahun 2023. Kontribusi PKB terhadap PAD juga menunjukkan tren meningkat dari 27,72% pada tahun 2019 menjadi puncaknya 33,25% pada tahun 2021, namun kembali menurun menjadi 28,85% pada tahun 2023. Rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD selama periode ini adalah sekitar 30,15%. Ini menunjukkan bahwa PKB merupakan salah satu sumber PAD yang signifikan dan berpotensi untuk terus ditingkatkan melalui pengelolaan yang lebih efektif dan kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Provinsi Jambi.

ABSTRAC

This study aims to analyze the revenue from motor vehicle tax (PKB) and its contribution to the Regional Original Revenue (PAD) of Jambi Province for the period 2019-2023. Motor vehicle tax is one of the key components in the structure of PAD and plays an important role in supporting regional development financing. The method used in this study is descriptive quantitative with a percentage contribution approach over the past five years.

The results show that PKB revenue in Jambi Province increased from 2019 to 2022, although it experienced a slight decline in 2023. PKB revenue rose from IDR 457.83 billion in 2019 to IDR 612.41 billion in 2022, before decreasing slightly to IDR 604.47 billion in 2023. The contribution of PKB to PAD also showed an upward trend from 27.72% in 2019, peaking at 33.25% in 2021, before declining again to 28.85% in 2023. The average contribution of PKB to PAD during this period was approximately 30.15%. These findings indicate that PKB is a significant source of regional revenue and has the potential to be further optimized through more effective management and policies that support improved taxpayer compliance.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Regional Original Revenue, Contribution, Jambi Province.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, daerah memiliki kewenangan yang luas dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadikan aspirasi serta ide masyarakat sebagai fondasi utama, sambil tetap mengikuti peraturan daerah. Keberhasilan pemerintahan dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh pendapatan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan utama yang mendukung kemajuan wilayah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dari lima jenis pajak yang menjadi wewenang provinsi, pajak kendaraan bermotor terbukti memiliki pengaruh paling besar terhadap perkembangan ekonomi daerah. Karena kendaraan bermotor sangat membantu orang dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, bertambahnya kepemilikan kendaraan roda dua maupun roda empat di masyarakat menjadi sebuah potensi bagi pemerintah lokal untuk mengoptimalkan perolehan sumber daya finansialnya.

Judul penelitian ini ditujukan oleh peneliti untuk melihat semakin berkembangnya daerah Provinsi Jambi maka secara tidak langsung semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh Masyarakat serta ingin mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan permasalahan riset dengan judul *“Analisis Penerimaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi (Studi Kasus Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah/BPKPD Provinsi Jambi)”*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari instansi seperti dokumen LRA dan dokumen lainnya yang di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perkembangan PAD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal. Berikut data mengenai Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

**Tabel 1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi
Periode 2019 - 2023**

Tahun	PAD (Rupiah)	Perkembangan %
2019	1.652.000.000.000	-
2020	1.535.000.000.000	7,08

2021	1.535.000.000.000	0,00
2022	1.875.000.000.000	22,15
2023	2.095.000.000.000	11,73
Rata-rata	1,738.000.000.000	6,70

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PAD Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan positif rata-rata sekitar **6,7% per tahun**, menandakan arah yang baik menuju kemandirian fiskal daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. PKB menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan dari sektor perpajakan daerah, khususnya sektor transportasi.

Adapun yang menjadi Realisasi Penerimaan PKB di Provinsi Jambi pada Periode 2019 - 2023 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jambi
Periode 2019 - 2023**

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Pekembangan (%)
2019	457.833.100.330	-
2020	465.129.288.875	1,59
2021	510,370,054,254	9,73
2022	612,407,646,754	19,99
2023	604,470,700,510	1,30
Rata-Rata	530,032,451,975	7,50

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi

Secara keseluruhan penerimaan PKB Provinsi Jambi masih berada dalam kategori baik dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2019-2023 sebesar **7,50% per tahun**. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah mampu menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan bermotor. Meskipun terdapat fluktuasi pada tahun terakhir, tren lima tahun terakhir memperlihatkan arah yang positif dan berkelanjutan. Sebagai pajak yang bersifat langsung dan dipungut dari kepemilikan maupun penggunaan kendaraan bermotor, PKB memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Berikut rumus untuk mencari hasil daripada kontribusi yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Adapun hasil daripada kontribusi yaitu dianalisis menunjukkan nilai PAD dan Penerimaan dari PKB sebagai berikut;

Tabel 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode 2019 - 2023

Tahun	PAD (Rp)	PKB (Rp)	Kontribusi (%)
2019	1.652.000.000.000	457.833.100.330	27,72

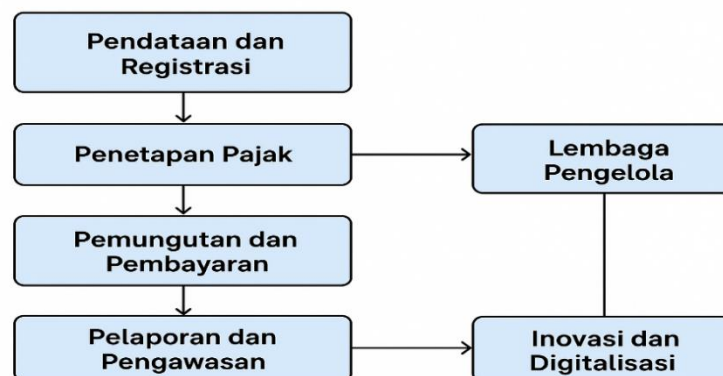
2020	1.535.000.000.000	465.129.288.875	30,29
2021	1.535.000.000.000	510,370,054,254	33,25
2022	1.875.000.000.000	612,407,646,754	32,66
2023	2.095.000.000.000	604,470,700,660	28,85
Rata - rata	1,738.000.000.000	530,032,451,975	30,95

Sumber: BPKPD dan BPS Provinsi Jambi

selama periode 2019-2023, kontribusi rata-rata PKB terhadap PAD Provinsi Jambi mencapai sekitar 30,95% per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa PKB merupakan komponen penting dan kontributor utama PAD, bersama dengan pajak lain seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Meskipun terjadi fluktuasi pada tahun 2023, kontribusi PKB masih mencerminkan kinerja keuangan daerah yang stabil dan berdaya tahan.

Sistem pengelolaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jambi saat ini mengintegrasikan layanan konvensional dan digital untuk mempermudah wajib pajak. Sistem ini melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (melalui Badan Keuangan Daerah/BPKPD), Kepolisian Daerah (Korlantas), Jasa Raharja, dan Bank Jambi.

Sistem Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jambi



Gambar 1. Sistem Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data penerimaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jambi dari tahun 2019 hingga 2023, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jambi selama periode tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum terjadi fluktuasi penerimaan, namun menunjukkan tren peningkatan pada akhir periode pengamatan. Pada tahun 2020, penerimaan PAD dan PKB mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2023 terjadi pemulihan yang signifikan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi serta kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Penerimaan **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Provinsi Jambi. Data menunjukkan bahwa nilai realisasi PKB tahun 2019 sebesar sekitar Rp457,8 miliar meningkat menjadi Rp612,4 miliar pada tahun 2022,

dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai lebih dari 10%. Tahun 2023, realisasi PKB kembali mendekati target yang ditetapkan pemerintah provinsi, menandakan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor telah berjalan lebih efektif. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi layanan pembayaran pajak berbasis digital melalui Samsat Online. Provinsi Jambi Pada Periode 2019 - 2023, Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi berkisar antara 27,72% hingga 33,25%. Artinya pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang tinggi bagi pemerintahan Provinsi Jambi. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang stabil, namun harus di barengi dengan penguatan sistem pengelolaannya.

Sistem pengelolaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jambi saat ini mengintegrasikan layanan konvensional dan digital untuk mempermudah wajib pajak. Sistem ini melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (melalui Badan Keuangan Daerah/BPKPD), Kepolisian Daerah (Korlantas), Jasa Raharja, dan Bank Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adolph, R. (2016). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau*. 1-23.
- Anggini, M. L. A., Sangkala, M., & Samsinar. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kota Makassar. *Pinsi Journal of Art, Humanity, & Socil Studies*, 4(2), 316-327.
- Anggoro, damas dwi. 2017. "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." In Malang: UB Press, 19.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :PT. Rineka Cipta .
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jambi. (2024). **Laporan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023**. Jambi: Pemprov Jambi.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Jambi Tahun 2019**. Jambi: BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- BPS. (2023). *Provinsi Jambi dalam Angka*. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- CA, B., & Juliantika, J. (2016). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 3. <https://doi.org/10.35137/jabk.v3i2.67>
- Dilla, A. C. (2020). *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT/UPPD Pematangsiantar)*.
- Fornia, E., Mukhzarudfa, & Gowon, M. 2021. Analisis Kinerja Keuanganm Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*.
- Guritno, T. (2008). *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press
- Hadi, S. S. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada. *MONETER; Jurnal Akuntansi Dan Keuangan BSI*, 5(2), 185-194.
- Halim, Abdul. Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Adolph, R. (2016). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah*

Provinsi Kepulauan Riau. 1-23.

Hadi, S. S. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada. *MONETER; Jurnal Akuntansi Dan Keuangan BSI*, 5(2), 185-194. https://www.dipendajatim.go.id/?Page_Id=602

Ipu, R. V., Karamoy, H., & Kindangen, W. D. (2022). Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 827-836. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/3945>

Islami, D., & Rahmawati, L. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(2), 169-179. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.169-179>

Maharani, C. S. (2018). *Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016*.

Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 385-399.

Muetya, sena G., Rifai, M., & santoso, teguh, panji, M. (2022). Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial & Perpajakan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483-1490.

Murtiono, H. (2008). Modul Belajar Geografi. *Universitas Pendidikan Indonesia*.

Niayah, N., & Danisya, D. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(6), 731-736. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i6.409>

Nurbayani, Teri, & M. As'ad. (2021). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020. *Accounting, Accountability, and*

Organization System (AAOS) Journal, 3(1), 43-59. <https://doi.org/10.47354/aaos.v3i1.312>

pemerintahan.malangkota.go.id. (2022). Struktur Organisasi. *Pemerintahan.Malangkota.Go.Id*, April. https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=10

Perpajakan, U.-U. N. 2. T. 2007 T. T. cara. (2007). Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah. *生化学*, 7(3), 213-221.

Pinkan Grace Assa, Hendrik Manossoh, L. M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode (2013-2017). 13(4), 730-733.

Rahmi. (2021). fungsi dan kedudukan APBD. *Galang Tanjung*, 2504, 1-9.

Reza, D., Ramadhani, D., Mahfudzoh, N., Ramadhani, D. K., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic Education*, 2(1), 1-15.

Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 8491. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>

Rompis, N. E., Ilat, V., Wangkar, A., Ekonmi, F., & Akuntansi, J. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Berkala Ilmiah Efesiensi*, 15(03), 51-62.

- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik : Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Tambunan, E., & Fitri, I. (2022). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 20152020*. 2(1), 238-245.
- Thomas Nadeak, and Eva Sunasti. 2019. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973 /154 2018." *Buana Ilmu* 4(1): 25-54.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Winartha Made I. (2006:155). *Metode Deskriptif*: ALFABETA